

HILIRISASI MINYAK SAWIT DOMESTIK: MERUBAH DARI "RAJA" CPO MENJADI "RAJA" PRODUK HILIR

Oleh
Tim Riset PASPI

ABSTRAK

Mentransformasi industri sawit Indonesia dari "Raja" CPO dunia menjadi "Raja" Produk Hilir, memerlukan tiga jalur hilirisasi domestik yakni Jalur Hilirisasi Oleopangan (oleofood complex), Jalur Hilirisasi Oleokimia (oleochemical complex) dan Jalur Hilirisasi Biofuel (biofuel complex). Ketiga jalur tersebut ditempatkan dalam kerangka strategi industrialisasi yang mengkombinasikan Promosi Ekspor dan Subsitusi Impor. Untuk mendukung hilirisasi tersebut, perlu didukung kebijakan pemerintah yakni Perbaikan Kemudahan dan Efisiensi Perizinan, Peningkatan dan Penyediaan Kualitas Infrastruktur serta Penurunan Suku Bunga Kredit. Kombinasi ketiga kebijakan tersebut akan mempercepat hilirisasi dan menguntungkan baik bagi produsen TBS/CPO, pelaku hilir, konsumen maupun pemerintah.

Keywords : hilirisasi, promosi ekspor, subsitusi impor, suku bunga kredit

PENDAHULUAN

Indonesia telah berhasil menjadi produsen CPO terbesar dunia sejak tahun 2006 lalu. Tantangan berikutnya adalah merubah dari "raja" CPO dunia menjadi "raja" produk hilir dunia yakni produk: oleofood, produk oleokimia dan biofuel.

Mempertahankan apalagi terlena sebagai "raja" CPO dunia sangat merugikan Indonesia khususnya dalam jangka panjang. Ketergantungan Indonesia pada pasar CPO dunia akan membuat industri minyak sawit Indonesia mudah dipertandingkan pasar CPO dunia karena industri hilir minyak sawit berada dan dikuasai negara-negara lain. Selain itu, nilai tambah industri hilir juga tidak dinikmati Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempercepat hilirisasi minyak sawit didalam negeri.

Hilirisasi industri minyak sawit nasional hendaknya ditempatkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi Indonesia. Sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional, hilirisasi minyak sawit perlu dirancang jauh kedepan (visioner) misalnya sampai menuju 100 tahun Negara Republik Indonesia yakni sampai tahun 2045. Kita harus memutuskan saat ini, mau seperti apa industri minyak sawit kita pada tahun 2045.

PASPI mengusulkan hilirisasi industri minyak sawit Indonesia menuju 2045, yakni merubah posisi Indonesia dari "raja" CPO dunia saat ini, menjadi "Raja-4" yakni produk Oleofood, Biolubrikan, Biosurfaktan dan Biofuel pada tahun 2045. Jika "Raja-4" tersebut dapat kita raih, maka Indonesia akan menjadi pemain penting dalam ekonomi global. Indonesia tidak perlu mengejar menjadi pemain industri otomotif global, Indonesia cukup menjadi pemasok bahan bakar biofuel dan pelumas otomotif global.

Hilirisasi yang dimaksudkan adalah hilirisasi minyak sawit didalam negeri, meskipun tidak tertutup kemungkinan hilirisasi minyak sawit di negara lain (go internasional) sebagai salah satu strategi penetrasi pasar. Strategi hilirisasi minyak sawit didalam negeri bukan berarti merubah regim dari melihat keluar (*outward looking*) menjadi melihat kedalam (*inward looking*).

Hilirisasi minyak sawit didalam negeri yang dimaksudkan merupakan perpaduan strategi promosi ekspor (*export promotion*) dengan substitusi impor (*import substitution*). Intinya melalui hilirisasi domestik kita mengolah CPO menjadi produk-produk bernilai tambah lebih tinggi baik untuk tujuan ekspor maupun untuk pengganti produk yang diimpor selama ini seperti solar, avtur, premium, plastik, pelumas, dan sebagainya.

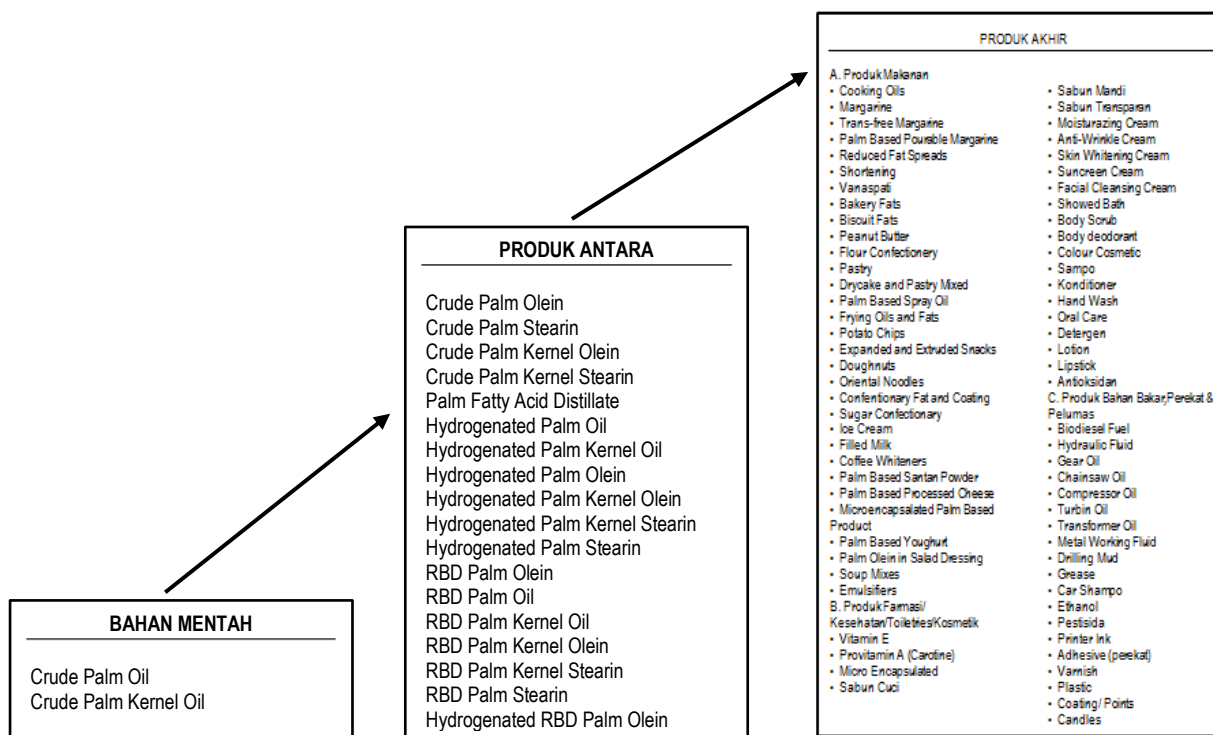
Dalam tulisan ini didiskusikan bagaimana strategi hilirisasi minyak sawit dapat dilakukan di Indonesia. Selain itu, juga didiskusikan dukungan kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk mempercepat hilirisasi tersebut.

TIGA JALUR HILIRISASI DOMESTIK

Secara umum, hilirisasi/pendalaman (*deepening industry*) minyak sawit dapat dibagi atas tiga jalur hilirisasi sebagai berikut (Gambar 1). **Pertama**, Jalur Hilirisasi Oleopangan (*oleofood complex*) yakni pendalaman industri-industri hilir CPO/PKO untuk menghasilkan produk antara oleopangan (*intermediate oleofood*) sampai pada produk jadi oleo pangan (*oleofood product*).

Kedua, Jalur Hilirisasi Oleokimia (*oleochemical complex*) yakni pendalaman industri-industri yang mengolah CPO/PKO menjadi produk antara oleokimia/oleokimia dasar sampai pada produk jadi seperti produk biosurfaktan, biolubrikan dan biomaterial. **Ketiga**, Jalur Hilirisasi Biofuel (*biofuel complex*) yakni pendalaman industri-industri hilir yang mengolah CPO/PKO menjadi produk antara biofuel sampai pada produk jadi biofuel seperti biodiesel, bioavtur, biopelumas.

Dari sudut pandang industrialisasi dan perdagangan internasional, hilirisasi minyak sawit domestik tersebut dapat dikembangkan dalam kerangka kombinasi strategi industri Promosi Ekspor (EO) dan Substitusi Impor (SI) dengan berbagai fase. Dari segi Promosi Ekspor dapat dibagi atas dua fase utama yakni fase pertama; (EO₁) dengan produk yang diekspor berupa produk antara dan fase kedua (EO₂) dengan produk yang diekspor adalah produk jadi.



Gambar 1. Hilirisasi Industri Minyak Sawit dari Bahan Mentah menjadi Produk Antara dan Produk Akhir

Sedangkan untuk Subsitusi Impor juga terdiri atas dua fase yakni fase pertama (SI₁) yakni menghasilkan produk antara yang mensubsitusi produk antara sejenis yang diimpor dan fase kedua (SI₂) adalah menghasilkan produk jadi yang mensubsitusi produk jadi yang diimpor.

Dengan demikian perpaduan antara Pomosi Ekspor dan Subsitusi Impor, industrialisasi dan perdagangan internasional minyak sawit dapat dibagi 4 kombinasi strategi yakni EO₁SI₁ (mengeksport produk antara sekaligus mensubsitusi produk antara lain yang diimpor), EO₂SI₁ (mengeksport produk antara dan mensubsitusi produk jadi yang diimpor), EO₁SI₂ (mengeksport produk jadi dan mensubsitusi produk antara yang diimpor) dan EO₂SI₂ (mengeksport produk akhir dan mensubsitusi produk jadi yang diimpor).

Idealnya industrialisasi berevolusi dari EO₁SI₁ menuju EO₂SI₂. Bergerak dari produk bernilai tambah rendah ke produk yang bernilai tambah tinggi. Dari segi kepentingan nasional tentu akan lebih bermanfaat jika Indonesia menuju eksportir produk jadi minyak sawit karena manfaat ekonomi

(multiplier ekonomi) akan terjadi didalam negeri.

Perpaduan strategi promosi ekspor dan subsitusi impor (EO₁SI₁) tersebut berlaku untuk ketiga jalur hilirisasi tersebut. Tidak hanya terbatas hanya pada industri hilir minyak sawit melainkan juga dilihat kaitannya dengan industri-industri/produk lain terkait dalam perekonomian pengembangan industri biodiesel (FAME) tergolong pada strategi EO₂SI₂ yakni menghasilkan biodiesel untuk mensubsitusi solar yang diimpor (mandatori biodiesel) dan sekaligus mengeksport biodiesel. Demikian juga pengembangan bioavtur dan biopelumas berbahan minyak sawit juga termasuk dalam strategi EO₂SI₁ tersebut.

Dengan demikian, manfaat ekonomi hilirisasi bahkan industri minyak sawit secara keseluruhan tidak hanya melihat berapa devisa yang dihasilkan dari ekspor tetapi juga perlu diperhitungkan berapa devisa yang dihemat akibat subsitusi impor. Nilai strategis industri biodiesel di Indonesia tidak hanya dilihat berapa besar devisa yang diperoleh dari ekspor biodiesel tetapi juga mencakup devisa yang dihemat dari pengurangan impor solar akibat disubsitusi biodiesel domestik.

DUKUNGAN KEBIJAKAN

Hilirisasi industri minyak sawit tentunya merupakan bagian tak terpisahkan dengan strategi industrialisasi nasional. Karena itu, hilirisasi sawit yang diharapkan terjadi didalam negeri untuk memberi manfaat yang maksimal bagi rakyat Indonesia.

Untuk mempercepat hilirisasi sawit didalam negeri, memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah setidaknya dalam tiga aspek utama yakni (1) Kemudahan dan efisiensi perizinan usaha/investasi, (2) Ketersediaan infrastruktur dan (3) Tingkat suku bunga kredit yang kompetitif dengan negara lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa untuk ketiga aspek tersebut di Indonesia kompetitif dibandingkan dengan negara-negara Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan negara-negara tujuan ekspor khususnya Cina dan India.

Aspek Kemudahan dan Efisiensi Perizinan di Indonesia masih tergolong buruk di Indonesia (Tabel 1). Untuk indikator jumlah izin-izin dan lama waktu

yang dibutuhkan di Indonesia saat ini, masih lebih buruk dibandingkan di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Jika tidak dilakukan perbaikan Kemudahan dan Efisiensi Perizinan tersebut, maka dengan diberlakukannya MEA sejak Januari 2016 lalu, maka hilirisasi sawit akan lebih memilih di negara anggota MEA lainnya. Oleh karena itu paket-paket kebijakan ekonomi berjilid-jilid yang telah dikeluarkan pemerintah saat ini harus memastikan terjadinya perbaikan Kemudahan perizinan tersebut secara revolusioner.

Dalam Aspek Ketersediaan Infrastruktur di Indonesia saat ini juga masih tergolong buruk (Tabel 2). Indeks Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur di Indonesia masih lebih buruk dengan negara-negara anggota MEA bahkan juga dengan Cina sebagai negara tujuan ekspor minyak sawit. Sehingga dengan kondisi Ketersediaan Kualitas infrastruktur yang demikian, hilirisasi di kawasan MEA cenderung di luar Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Peringkat Dunia antara Indonesia dengan Negara Tetangga dalam Perizinan Usaha.

Uraian	Indonesia			Malaysia			Thailand			Singapura		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Jumlah perizinan usaha	87	104	118	20	10	10	29	20	22	8	10	10
Lama pengurusan izin	125	128	129	16	16	21	99	106	108	4	5	5

Sumber: World Economic Forum, 2015.

Tabel 2. Perbandingan Indeks Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Indonesia Dibandingkan Negara lain pada Tahun 2014

Infrastruktur	Indonesia	Singapura	Malaysia	Thailand	Cina	India	Belanda	Jerman
Jalan	3.9	6.1	5.6	4.5	4.6	3.8	6.1	5.9
Kereta Api	3.7		5.0	2.4	4.8	4.2	5.6	5.7
Transportasi Udara	4.5	6.8	5.7	5.3	4.7	4.3	6.8	5.7
Pelabuhan Laut	4.0	6.7	5.6	4.5	4.6	4.0	6.4	5.9
Llstriik	4.3	6.7	5.7	5.1	5.2	3.4	6.6	6.1
Skor rata-rata	4.1	6.6	5.5	4.4	4.8	3.9	6.3	5.9

Sumber: World Economic Forum, 2015

Tabel 3. Perbandingan Lending Rate di Indonesia dengan Negara-negara Produsen CPO dan Negara Tujuan Ekspor (%)

Negara	2000	2010	2011	2012	2013	2014
Indonesia	18.5	13.3	12.4	11.8	11.70	12.6
Thailand	7.8	5.9	6.9	7.1	7.1	6.8
Malaysia	7.7	5.0	4.9	4.8	4.8	4.6
Philipina	10.9	7.7	6.7	5.7	5.7	5.5
Singapura	5.8	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
India	12.3	8.3	10.2	10.6	10.6	10.3
China	5.9	5.8	6.6	6.0	6.0	5.6
Belanda	4.8	1.8	2.0	1.6	1.6	1.6
USA	9.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3

Sumber: The World Bank, 2015

Kita berharap program *big-push* infrastruktur yang sedang dilakukan pemerintah saat ini mulai dari pembangunan jalan dan kreta api Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, pembangunan tol laut, penataan pengelolaan pelabuhan laut dan pembangunan bandara, Indonesia dapat mengejar Ketersediaan dan Kualitas infrastruktur negara lain. Setidaknya dengan pembangunan infrastruktur tersebut yang tergolong terbesar dalam sejarah pembangunan Indonesia, kita dapat kompetitif baik dikawasan MEA maupun dengan negara tujuan ekspor minyak sawit.

Berbagai studi mengungkapkan bahwa infrastruktur sangat berpengaruh pada hilirisasi minyak sawit. Joni (2012) mengungkapkan bahwa peningkatan penyediaan infrastruktur di Indonesia sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan hilirisasi minyak sawit di dalam negeri.

Aspek ketiga yang merupakan momok bagi investasi selama ini adalah bunga kredit yang super mahal di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara MEA dan juga negara-negara tujuan ekspor minyak sawit. Tingkat suku bunga kredit (*lending rate*) di Indonesia selalu lebih mahal dan termahal di Indonesia dibandingkan dengan tingkat suku bunga di negara-negara MEA (Tabel 3).

Sampai saat ini Indonesia masih mempertahankan regim suku bunga tinggi dengan tingkat suku bunga kredit konsisten diatas 10 persen. Sedangkan negara-negara anggota MEA lainnya termasuk Malaysia sebagai kompetitor hilirisasi minyak sawit

sudah jauh dibawah tingkat suku bunga Indonesia. Bahkan tingkat suku bunga di negara-negara tujuan ekspor minyak sawit (juga kompetitor hilirisasi) seperti Cina jauh lebih rendah dibanding Indonesia.

Jika pemerintah khususnya Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tidak secara revolusioner menurunkan tingkat suku bunga kredit, maka investasi hilir sulit diharapkan terjadi di Indonesia. Investasi hilir minyak sawit merupakan kegiatan investasi yang bersifat padat modal (*capital intensive*) dan bejangka panjang, sehingga jika biaya modal (tingkat suku bunga kredit) mahal akan menghambat hilirisasi.

Pengaruh tingkat suku bunga kredit terhadap hilirisasi minyak sawit sudah banyak diteliti para ahli. Hasil studi (Manurung, 1993; Susila, 2004; Purba, 2011; Joni, 2012; PASPI Monitor, 2015) membuktikan bahwa penurunan tingkat suku bunga kredit di Indonesia akan mendorong hilirisasi minyak sawit. Bahkan hasil-hasil penelitian tersebut juga membuktikan bahwa jika suku bunga kredit diturunkan hilirisasi minyak sawit didalam negeri makin meningkat meskipun tanpa pajak ekspor CPO.

Dengan kata lain, Indonesia memerlukan perubahan kebijakan hilirisasi minyak sawit kedepan. Kebijakan pajak ekspor minyak sawit yang selama ini ditempuh pemerintah untuk mendorong hilirisasi, selain tidak berhasil juga merugikan Indonesia itu sendiri terutama produsen CPO. Oleh karena itu kebijakan tersebut harus segera ditinggalkan dan beralih pada kebijakan non pajak yakni

infrastruktur dan khususnya tingkat suku bunga kredit. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang dikombinasikan dengan penurunan tingkat suku bunga kredit akan mempercepat hilirisasi dan menguntungkan baik bagi produsen TBS/CPO, pelaku hilir, konsumen maupun pemerintah.

KESIMPULAN

Untuk mentransformasi industri sawit Indonesia dari "Raja" CPO dunia menjadi "Raja" Produk Hilir, memerlukan hilirisasi domestik melalui tiga jalur. **Pertama**, Jalur Hilirisasi Oleopangan (*oleofood complex*) yakni pendalaman industri-industri hilir CPO/PKO untuk menghasilkan produk antara oleopangan (*intermediate oleofood*) sampai pada produk jadi oleo pangan (*oleofood product*). **Kedua**, Jalur Hilirisasi Oleokimia (*oleochemical complex*) yakni pendalaman industri-industri yang mengolah CPO/PKO menjadi produk antara oleokimia/oleokimia dasar sampai pada produk jadi seperti produk biosurfaktan, biolubrikan dan biomaterial. **Ketiga**, Jalur Hilirisasi Biofuel (*biofuel complex*) yakni pendalaman industri-industri hilir yang mengolah CPO/PKO menjadi produk antara biofuel sampai pada produk jadi biofuel seperti biodiesel, bioavtur, biopelumas. Ketiga jalur tersebut ditempatkan dalam kerangka strategi industrialisasi yang mengkombinasikan Promosi Ekspor dan Subsitusi Impor.

Untuk mendukung hilirisasi tersebut, memerlukan perubahan kebijakan hilirisasi minyak sawit kedepan. Kebijakan pajak ekspor minyak sawit yang selama ini ditempuh pemerintah untuk mendorong hilirisasi, selain kurang berhasil juga merugikan Indonesia terutama produsen TBS/CPO. Oleh karena itu kebijakan tersebut harus segera ditinggalkan dan beralih pada kebijakan non pajak yakni Perbaikan Kemudahan dan Efisiensi Perizinan, Peningkatan dan Penyediaan Kualitas Infrastruktur serta Penurunan Suku Bunga Kredit. Kombinasi ketiga kebijakan tersebut akan mempercepat hilirisasi dan menguntungkan baik bagi produsen TBS/CPO, pelaku hilir, konsumen maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Joni, R. 2012. Dampak Pengembangan Biodiesel dari Kelapa Sawit Terhadap Kemiskinan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Disertasi. IPB. Bogor.
- Manurung J. 1993. *Model Ekonometrika Industri Komoditi Kelapa Sawit Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan*. Tesis S-2. PPS-IPB. Bogor.
- Obado Z, Y Syaikat dan H Siregar. 2009. *The Impact of Export Tax Policy on The Indonesian CPO Industry*. Journal ISSAAS. 15 (2): 107- 119.
- PASPI Monitor. 2015. Kerugian Produsen Sawit Akibat Bea Keluar/Pungutan Ekspor Dapat Dikompensasi Subsidi Bunga Kredit. Vol 1: 11, p 77-84. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, PASPI. Bogor
- PASPI, 2014: *Industri Minyak Sawit Indonesia Berkelanjutan*. Peranan Industri Minyak Kelapa Sawit Dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Pedesaan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pelestarian Lingkungan. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, PASPI. Bogor.
- Purba, JHV. 2011. *Dampak Pajak Ekspor Terhadap Industri Minyak Goreng Indonesia*. Disertasi Doktor. SPS-IPB. Bogor.
- Sipayung, T. dan, JHV Purba. 2015. *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit*. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, PASPI. Bogor
- Susila, W.R. 2004. *Impact of CPO Export Tax on Several Aspects on Indonesia CPO Industry*. Oil Palm Industry Economic Journal 4 (2): 1-13.
- The World Bank. 2015. World Development Indicators: Monetary Indicators.
- World Economic Forum. 2015. The Global Competitiveness Report 2010 – 2015: World Economic Forum. Geneva.
- World Growth, 2011: *The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia*. World Growth